

**IMPLEMENTASI PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR NO. 50
TAHUN 2022 TENTANG PENANGGULANGAN PENYAKIT
TUBERKULOSIS DI PUSKESMAS BADEGAN
KABUPATEN PONOROGO**

Sayudi Joko Handoko¹; Joko Pramono²; Aris Tri Haryanto³

¹ MAP, Universitas Slamet Riyadi Surakarta

² MAP, Universitas Slamet Riyadi Surakarta

³ MAP, Universitas Slamet Riyadi Surakarta

Correspondence Author: sayudijoko@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui implementasi Peraturan Gubernur Jawa Timur No. 50 Tahun 2022 tentang Penanggulangan Penyakit Tuberkulosis di Puskesmas Badegan Kabupaten Ponorogo. Jenis penelitian ini adalah deskriptif yang dilakukan di Puskesmas Badegan Kabupaten Ponorogo. Informan dipilih menggunakan teknik purposive sampling. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, dokumentasi dan observasi. Teknik analisis data menggunakan analisis data kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi antar pihak terkait implementasi kebijakan Pergub Jatim No. 50 Tahun 2022 tentang Penanggulangan Penyakit Tuberkulosis di Puskesmas Badegan sudah berjalan baik melalui sosialisasi. Sumber daya manusia sudah baik, anggaran terpenuhi serta sarana dan prasarana sudah lengkap, walaupun distribusi kadang terlambat. Disposisi antar pihak sudah berjalan baik karena sudah memiliki pengetahuan dan pemahaman, sikap pelaksana yang menerima tugas dan tanggung jawab serta komitmen yang tinggi disertai dengan sikap jujur dan bertanggung jawab dalam pelaksanaan kerjanya. Struktur birokrasi bertugas sesuai tugasnya, mampu memahami tugas dengan baik dan menjalankan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP). Hambatan dalam implementasi adalah keterlambatan sarana dan prasarana serta dari pasien dalam meminum obat, sehingga perlu upaya menjaga stock obat serta terus intensif dalam peningkatan tugas Pengawas Minum Obat (PMO) yang berasal dari keluarga pasien untuk terus memberkan pemahaman kepada pasien.

Kata kunci: Implementasi, Penanggulangan Penyakit, Tuberculosis

ABSTRACT

The purpose of this research is to determine the implementation of East Java Governor Regulation No. 50 of 2022 concerning the Management of Tuberculosis at the Badegan Public Health Center Ponorogo. This type of research is descriptive, carried out at the Badegan Public Health Center Ponorogo.

Informants were selected used purposive sampling techniques. Data collection techniques used interviews, documentation and observation. The data analysis technique used qualitative data analysis. The research results show that communication between parties related to the implementation of the East Java Gubernatorial Regulation No. 50 of 2022 concerning the Management of Tuberculosis at the Badegan Public Health Center has been going well through outreach. Human resources are good, the budget is met and the facilities and infrastructure are complete, although distribution is sometimes late. The disposition between the parties has gone well because they have knowledge and understanding, the attitude of the implementer who accepts duties and responsibilities and high commitment accompanied by an honest and responsible attitude in carrying out their work. The bureaucratic structure functions according to its duties, is able to understand the tasks well and carry out according to the standart operaciona procedure. Obstacles in implementation are delays in facilities and infrastructure as well as patients taking medication, so efforts are needed to maintain drug stocks and continue to be intensive in increasing the duties of medication supervisor who come from patient families to continue to provide understanding to patients.

Keywords: Implementation, Disease Management, Tuberculosis

Pendahuluan

Tuberkulosis (TB) merupakan penyakit menular yang disebabkan kuman *Mycobacterium Tuberculosis*. Kuman TB tidak hanya menyerang paru-paru, tetapi juga ke berbagai organ dan jaringan tubuh lainnya. Penularan TBC dapat terjadi ketika penderita batuk, bersin, berbicara, atau meludah, mereka memercikkan kuman TB atau bacillia ke udara (Hasnanisa, dkk, 2022: 168). Tuberkulosis menjadi penyakit yang berbahaya dan menjadi penyebab kematian ke-13 dan penyakit menular ke-2 setelah COVID-19. Hasil Global TB Report tahun 2022

bahwa kejadian Tuberkulosis pada tahun 2020-2021 terjadi peningkatan. Insiden TBC pada tahun 2021 terjadi peningkatan 18% (absolut tahun 2020; 819.000 tahun 2021; 969.000 dan rate per 100.000 penduduk tahun 2020; 301 tahun 2021; 354) dan angka kematian TBC mengalami peningkatan 55% untuk aboslut (tahun 2020; 93.000 tahun 2021; 144.000), 52% untuk rate per 100.000 penduduk (tahun 2020; 34 tahun 2021; 52) (Kemenkes RI, 2023).

Keberadaan kasus TB di Indonesia membuat pemerintah perlu

untuk melakukan penanggulangan dengan membuat program yang disebut program Pencegahan dan Penanggulangan TB (P2TB). Pencegahan dan Penanggulangan TB (P2TB) adalah segala upaya kesehatan yang mengutamakan aspek promotif dan preventif, tanpa mengabaikan aspek kuratif dan rehabilitatif yang ditujukan untuk melindungi kesehatan masyarakat, menurunkan angka kesakitan, kecacatan atau kematian, memutuskan penularan, mencegah resistensi obat dan mengurangi dampak negatif yang ditimbulkan akibat Tuberkulosis (Kemenkes RI, 2016).

Pelayanan kesehatan yang tidak optimal dapat mempengaruhi pengobatan Tuberkulosis yang telah menjadi upaya pemerintah dalam mengeliminasi penyakit tersebut. Pemerintah mencanangkan untuk mengeliminasi Tuberkulosis pada tahun 2030, sehingga Pemerintah mengupayakan pelayanan kesehatan yang optimal di berbagai daerah dalam menanggulangi Tuberkulosis. Proses pengobatan Tuberkulosis memerlukan pengawasan karena

pengobatan TB tidak dapat dihentikan, karena dampaknya yang besar pada kejadian TB resisten membuat kondisi pasien menjadi lebih parah.

Monitoring merupakan salah satu fungsi manajemen untuk menilai keberhasilan pelaksanaan program tuberkulosis. Pelaksanaan strategi nasional dalam penanggulangan dan pencegahan Tuberkulosis harus dimonitor secara berkala dan dievaluasi secara sistematis. Tujuan monitoring dalam Strategi Nasional Penanggulangan Tuberkulosis adalah untuk: (1) memantau proses dan perkembangan implementasi strategi nasional secara berkala dan berkelanjutan, (2) mengidentifikasi masalah dan kesenjangan pada waktu implementasi, dan (3) mengatasi masalah yang teridentifikasi dan mengantisipasi dampak dari permasalahan. Monitoring dapat dilakukan dengan membaca dan menilai laporan rutin maupun laporan tidak rutin, serta kunjungan lapangan. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi merupakan tanggung jawab masing-masing tingkat pelaksana program, mulai dari

fasilitas kesehatan, kabupaten/kota, provinsi hingga pusat (Kemenkes RI, 2020).

Pemberhentian pengobatan TB dapat meningkatkan angka kejadiannya lebih tinggi dan dapat menyebabkan peningkatan kematian sebesar 13% (Hogan, *et al*, 2020). Salah satu masalah terbesar pada terapi TB ialah pengobatan dalam waktu yang panjang sehingga pasien diharuskan untuk minum obat setidaknya selama enam bulan yang terbagi dua bulan fase intensif dan empat bulan fase lanjutan (Rahmi *et al.*, 2017). Ketidapatuhan terhadap pengobatan mengakibatkan tingginya angka kegagalan pengobatan penderita tuberkulosis (Putra, dkk, 2021).

Pencegahan yang dilakukan dan penanggulangan tentang masalah Tuberkulosis diperlukan peran semua pihak baik dari pasien, keluarga dan institusi kesehatan, salah satunya adalah peran puskesmas. Puskesmas adalah garda terdepan di dalam pelayanan kesehatan tingkat pertama yaitu sebagai penyedia layanan kesehatan dasar dalam pemberian pelayanan kesehatan secara

universal, termasuk di dalamnya di dalam pelayanan kesehatan penderita TB. Puskesmas berperan penting di dalam mewujudkan kesehatan masyarakat. Puskesmas bertanggung jawab atas sebagian saja dari upaya peningkatan kesejahteraan yang dibebankan oleh dinas kesehatan kabupaten/kota sesuai dengan kemampuannya.

Salah satu Puskesmas yang ada di Kabupaten Ponorogo adalah Puskesmas Badegan Kabupaten Ponorogo. Hasil observasi pendahuluan dalam menangani Pasien TBC dan keluarga pasien bahwa kesadaran pasien/keluarga kurang proaktif dalam minum/pengambilan obat sehingga berpotensi Resiko *Drop Out* (DO), padahal pasien DO/positif dapat menularkan penyakitnya ke orang lain, permasalahan lainnya adalah karena kurangnya pengetahuan pasien maupun keluarga tentang penanganan TBC. Hasil observasi Puskesmas Badegan bahwa pada bulan Januari-September terjadi fluktuasi kejadian Tb yaitu:

**Tabel 1. Penderita TB di
Puskemas Badegan**

No.	Bulan	Jumlah (orang)
1	Januari	2
2	Februari	3
3	Maret	4
4	April	4
5	Mei	1
6	Juni	4
7	Juli	3
8	Agustus	3
9	September	7

**Sumber: Puskemas Badegan
Kabupaten Ponorogo, 2023**

Hasil tabel tersebut menunjukkan bahwa penderita TB di Puskemas Badegan mengalami trend yang meningkat, sehingga hal ini harus disikapi serius oleh Puskemas Badegan. Puskesmas Badegan menjadi kepanjangan tangan Pemerintah Daerah yang bertugas untuk memastikan Program Tuberkulosis masuk dalam indikator RPJMD dan Renstra untuk Penanggulangan Tuberkulosis, melaksanakan ketentuan kebijakan dan strategi program penanggulangan TB (NSPK) yang telah diterbitkan oleh Kementerian, menjamin pelaksanaan penanggulangan Tuberkulosis, menyediakan kebutuhan perbekalan kesehatan dan bahan pendukung

diagnosis, menyediakan kebutuhan pendanaan untuk operasional program penanggulangan Tuberkulosis, melakukan koordinasi lintas program dan lintas sektor serta jejaring kemitraan untuk kegiatan Penanggulangan TBC dengan institusi terkait di tingkat kabupaten, menyediakan kebutuhan pendanaan kegiatan peningkatan SDM Penanggulangan TB di wilayahnya dan menyediakan bahan untuk promosi TB (Kemenkes RI, 2020).

Puskesmas bertugas untuk mengatasi permasalahan yang terjadi di masyarakat, mulai rendahnya tingkat kesadaran masyarakat yang dapat membuat meningkatnya penderita TB karena ketidakpatuhan dalam meminum obat ataupun kurangnya pengetahuan, karena ketidakpatuhan masyarakat dapat menghambat kinerja Pemerintah Kabupaten Ponorogo dalam mencegah dan menanggulangi TB, sehingga melalui Puskesmas yang ada di Kabupaten Ponorogo berupaya untuk melakukan evaluasi kebijakan yang telah ditetapkan agar program penanganan dan penanggulangan pasien TB di

Puskesmas Badegan Kabupaten Ponorogo dapat berjalan dengan baik, maka diperlukan pengobatan TB yang sungguh-sungguh dengan prosedur untuk lebih mengembangkan administrasi kesejahteraan di Puskesmas. Puskesmas sendiri berfungsi sebagai kantor pelayanan kesehatan esensial yang secara lugas mengelola wilayah setempat. Puskesmas dituntut untuk fokus pada penyelenggaraan promotif dan preventif tanpa mengesampingkan upaya terapeutik dan rehabilitatif dalam penanganan TB.

Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode deskriptif mengenai implementasi kebijakan Peraturan Gubernur Jawa Timur No. 50 tahun 2022 tentang Penanggulangan Penyakit Tuberkulosis dengan lokasi di Puskesmas Badegan Kabupaten Ponorogo. Pengambilan informan menggunakan purposive sampling yang terdiri dari Kepala Bidang

Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Dinas Kesehatan Kabupaten Ponorogo, Kepala Puskesmas Badegan Kab. Ponorogo, 1 orang perawat, 1 orang Pengawas Minum Obat (PMO) Puskesmas Badegan, 1 orang PMO keluarga pasien dan 2 orang keluarga pasien TB. Pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan analisis kualitatif model interaktif dari Miles dan Huberman (2014: 10-11) yang meliputi kondensasi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan. Triangulasi yang digunakan yaitu triangulasi sumber (untuk membandingkan antara sumber yang satu dengan sumber yang lain, agar didapat simpulan yang objektif).

Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Implementasi kebijakan Peraturan Gubernur Jawa Timur No. 50 Tahun 2022 tentang Penanggulangan Penyakit Tuberkulosis bertujuan untuk menanggulangi penyakit TB di khususnya di Puskesmas Badegan.

Berdasarkan hasil dari pengumpulan data sesuai indikator-indikator yang telah dikemukakan oleh Edward III yaitu: komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi/ organisasi. Untuk memberi makna terhadap hasil penelitian tersebut dilakukan penjelasan dan pembahasan seperti yang diuraikan berikut ini.

1) Komunikasi dalam implementasi kebijakan Penanggulangan Penyakit Tuberkulosis bertujuan untuk menanggulangi penyakit TB

Hasil wawancara dengan informan menunjukkan bahwa penanggulangan TB di Puskesmas Badegan sudah berjalan dengan baik mengacu pada Peraturan Gubernur Jawa Timur, dimana pelaksana kebijakan sudah memahami dengan baik. Salah satu upaya komunikasi yang dilakukan adalah melalui sosialisasi, dimana dengan sosialisasi yang diberikan oleh Dinkes ke Puskesmas serta dilanjutkan ke masyarakat menunjukkan bahwa pada dasarnya komunikasi baik ke

bawah maupun ke atas sudah berjalan dengan baik. Hal ini sesuai dengan pernyataan dari Effendy (2009: 122) komunikasi internal adalah pertukaran gagasan diantara para administrator (Dineks) dan pegawai (Puskemas) dalam suatu organisasi atau instansi yang menyebabkan terwujudnya organisasi tersebut lengkap dengan strukturnya yang khas dan pertukaran gagasan secara horizontal dan vertikal dalam suatu organisasi yang menyebabkan pekerjaan berlangsung (operasi manajemen).

Menurut teori/model implementasi kebijakan dari Edward III (dalam Laary, dkk, 2022) bahwa komunikasi merupakan aspek pertama yang harus ada agar pelaksanaan kebijakan publik berjalan efektif. Komunikasi yang dimaksudkan oleh Edward III berkenaan dengan bagaimana kebijakan dikomunikasikan pada organisasi publik dan terutama masyarakat sebagai pemangku kepentingan.

Kebijakan akan dapat dilaksanakan dengan baik dan efektif jika terjadi komunikasi yang efektif antara pelaksana kebijakan/program dengan para pemangku kepentingan atau masyarakat umum. Dengan komunikasi maka tujuan dan sasaran dari kebijakan dapat disosialisasikan secara baik sehingga dapat menghindari adanya distorsi atau penolakan atas kebijakan tersebut. Komunikasi menjadi penting karena semakin tinggi pengetahuan dan pemahaman pada kebijakan maka akan mengurangi tingkat penolakan dan kekeliruan dalam mengaplikasikan kebijakan dalam ranah yang sesungguhnya. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa implementasi kebijakan Peraturan Gubernur Jawa Timur No. 50 Tahun 2022 tentang Penanggulangan Penyakit Tuberkulosis sudah berjalan baik dilihat dari dimensi komunikasi. Dengan komunikasi yang baik tersebut sehingga masyarakat menerima dan mendukung

pelaksanaan kebijakan terwujud dengan baik.

- 2) Sumber Daya dalam Implementasi Kebijakan Peraturan Gubernur Jawa Timur No. 50 Tahun 2022 tentang Penanggulangan Penyakit Tuberkulosis.

Pada penelitian ini dimensi sumberdaya dilihat dari kemampuan SDM dan kecukupan biaya operasional serta sarana dan prasarana kerja (fasilitas dan peralatan) dalam melaksanakan penanggulangan TB di Puskemas Badegan. Hasil penelitian menunjukkan dalam implementasi kebijakan Peraturan Gubernur Jawa Timur No. 50 Tahun 2022 tentang Penanggulangan Penyakit Tuberkulosis mengenai sumber daya manusia dan sumber daya fasilitas sudah baik karena sudah tercukupi secara kualitas, kuantitas dan semua fasilitas juga sudah terpenuhi dengan baik, walaupun terkadang di dalam pendistribusian mengalami keterlambatan

Sumber daya dalam implementasi Kebijakan

Peraturan Gubernur Jawa Timur No. 50 Tahun 2022 tentang Penanggulangan Penyakit Tuberkulosis terbagi dalam dua hal yaitu sumber daya manusia dan sumber daya fasilitas. Sumber daya manusia dalam implementasi kebijakan penanggulnagan TB sudah memenuhi baik dari sisi kualitas maupun kuantitas, dimana dari sisi kualitas sumber daya manusia telah mengikuti pelatihan tetapi kelemahannya adalah over job dari pegawai.

Implementasi kebijakan tidak akan berhasil tanpa adanya dukungan dari sumber daya manusia yang cukup kualitas dan kuantitasnya. Kualitas sumber daya manusia berkaitan dengan keterampilan, dedikasi, profesionalitas, dan kompetensi di bidangnya. Sumber daya manusia yang memiliki pengetahuan dan keterampilan dapat melaksanakan tugas menjadi lebih efektif dan efisien (Hatumale, 2013: 3).

Hasil penelitian bahwa secara kuantitas sumber daya manusia sudah memadai dalam rangka pelaksanaan tugas dan

juga kebijakan dan program pemerintah desa yang ditetapkan; demikian pla secara kualitas umumnya masih rendah karena hanya tamatan SLTA dan umumnya belum memperoleh pendidikan dan pelatihan di bidang pemerintahan, dan juga belum banyak pengalaman dalam menjalankan tugas pemerintahan. Begitu pula halnya dengan sumberdaya financial atau dana untuk pelaksanaan kebijakan/perdes keamanan dan ketertiban di desa ini masih kurang memadai.

- 3) Disposisi atau Sikap pelaksana dalam Implementasi kebijakan Peraturan Gubernur Jawa Timur No. 50 Tahun 2022 tentang Penanggulangan Penyakit Tuberkulosis

Hasil penelitian bahwa disposisi atau sikap pelaksana antara pihak-pihak yang terkait dalam implementasi kebijakan Peraturan Gubernur Jawa Timur No. 50 Tahun 2022 tentang Penanggulangan Penyakit Tuberkulosis sudah berjalan dengan baik karena sudah

memiliki pengetahuan dan pemahaman yang baik, sikap pelaksana yang menerima tugas dan tanggung jawab serta komitmen yang tinggi disertai dengan sikap jujur dan bertanggung jawab dalam pelaksanaan kerjanya.

Pengetahuan dan pemahaman pelaksana dalam implementasi kebijakan Peraturan Gubernur Jawa Timur No. 50 Tahun 2022 tentang Penanggulangan Penyakit Tuberkulosis sudah baik karena selalu memperoleh sosialisasi terlebih dahulu. Sikap pelaksana kebijakan dalam melaksanakan kebijakan mengenai Peraturan Gubernur Jawa Timur No. 50 Tahun 2022 tentang Penanggulangan Penyakit Tuberkulosis tercermin dari sikap untuk melaksanakan secara sungguh-sungguh sehingga apa yang menjadi tujuan dapat diwujudkan. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksana mendukung, menerima dan bekerja bersungguh-sungguh guna melaksanakan kebijakan tersebut

sehingga pelaksanaan menjadi lancar.

Menurut teori Edward III bahwa apabila implementor/pelaksana ingin melaksanakan sebuah kebijakan, maka pelaksana harus dapat melaksanakan apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan; tetapi ketika sikap atau pandangan para pelaksana berbeda dengan sipembuat kebijakan maka proses akan pelaksanaan sebuah kebijakan akan menjadi kompleks, sehingga menurut Edward III disposisi atau sikap pelaksana kebijakan merupakan faktor yang mempunyai konsekuensi-konsekuensi penting bagi implementasi kebijakan yang efektif. Disposisi ini berkenaan dengan kesediaan/komitmen, konsistensi dan kejujuran dari para implementor/ pelaksana untuk melaksanakan kebijakan dengan baik dan benar, serta tingkat demokrasi dalam pelaksanaannya. Hal ini sesuai pernyataan Agustino (2012: 142) bahwa sikap penerimaan dari pelaksana akan mempengaruhi

berhasil atau tidaknya kinerja implementasi kebijakan, hal ini sangat mungkin terjadi oleh karena kebijakan yang dilaksanakan. Winarno (2015: 174) menyatakan bahwa disposisi merupakan watak atau karakteristik yang dimiliki oleh implementor. Disposisi menentukan keberhasilan sebuah implementasi kebijakan. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik maka dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Disposisi memegang salah satu peran penting dalam keberhasilan sebuah implementasi kebijakan. Hal ini dikarenakan dalam menjalankan tugasnya, pelaksana kebijakan harus paham dan memiliki pandangan yang baik terkait dengan kebijakan.

- 4) Struktur Birokrasi dalam Implementasi kebijakan Peraturan Gubernur Jawa Timur No. 50 Tahun 2022 tentang Penanggulangan Penyakit Tuberkulosis

Hasil analisis bahwa struktur birokrasi dalam implementasi kebijakan Peraturan Gubernur Jawa Timur No. 50 Tahun 2022 tentang Penanggulangan Penyakit Tuberkulosis sudah bertugas sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing, serta menjalankan tugas sesuai dengan ketentuan yang dijalankan, memahami tugas dengan baik dan bekerja sesuai *Standard Operational Procedure (SOP)*.

Struktur birokrasi yang bertugas dalam implementasi kebijakan pembagian Peraturan Gubernur Jawa Timur No. 50 Tahun 2022 tentang Penanggulangan Penyakit Tuberkulosis sudah bertugas sudah sesuai dengan ketentuannya masing-masing. Hal ini sesuai dengan ungkapan George C. Edward III yang mengatakan bahwa fragmentasi adalah pembagian tanggung jawab sebuah bidang kepada unit-unit organisasi. Fragmentasi yang dilakukan dalam implementasi kebijakan Peraturan Gubernur

Jawa Timur No. 50 Tahun 2022 tentang Penanggulangan Penyakit Tuberkulosis akan terus berjalan efektif ketika pelaksanaan kebijakan tersebut dijalankan dengan penyebaran tanggung jawab yang baik.

Penutup

Kesimpulan dari hasil penelitian ini bahwa implementasi kebijakan Peraturan Gubernur Jawa Timur No. 50 Tahun 2022 tentang Penanggulangan tentang Penyakit Tuberkulosis bertujuan untuk menanggulangi penyakit TB di khususnya di Puskesmas Badegan dengan berdasarkan teori implementasi kebijakan model Edward III yang terdiri dari komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi/organisasi.

Hasil penelitian tentang komunikasi menunjukkan bahwa upaya komunikasi yang dilakukan sosialisasi, dimana dengan sosialisasi yang diberikan oleh Dinkes ke Puskesmas serta dilanjutkan ke masyarakat menunjukkan bahwa pada dasarnya komunikasi baik ke bawah maupun ke atas sudah

berjalan dengan baik. Dengan komunikasi yang baik tersebut sehingga masyarakat menerima dan mendukung pelaksanaan kebijakan terwujud dengan baik.

Sumber Daya dalam Implementasi Kebijakan Peraturan Gubernur Jawa Timur No. 50 Tahun 2022 tentang Penanggulangan Penyakit Tuberkulosis dilihat dari kemampuan SDM dan kecukupan biaya operasional serta sarana dan prasarana kerja (fasilitas dan peralatan) dalam sudah baik karena sudah tercukupi secara kualitas, kuantitas dan semua fasilitas juga sudah terpenuhi dengan baik, walaupun terdapat hambatan di dalam pendistribusian obat yang mengalami keterlambatan. Sumber daya manusia dalam implementasi kebijakan penanggulnagan TB sudah memenuhi baik dari sisi kualitas maupun kuantitas, dimana dari sisi kualitas sumber daya manusia telah mengikuti pelatihan tetapi kelemahannya adalah over job dari pegawai, secara kualitas SDM masih rendah karena hanya tamatan SLTA dan umumnya belum memperoleh pendidikan dan pelatihan

Disposisi atau Sikap pelaksana dalam Implementasi kebijakan Peraturan Gubernur Jawa Timur No. 50 Tahun 2022 tentang Penanggulangan Penyakit Tuberkulosis yaitu menunjukkan kerjasama lintas pihak sudah berjalan dengan baik karena sudah memiliki pengetahuan dan pemahaman yang baik, sikap pelaksana yang menerima tugas dan tanggung jawab serta komitmen yang tinggi disertai dengan sikap jujur dan bertanggung jawab dalam pelaksanaan kerjanya.

Struktur Birokrasi dalam Implementasi kebijakan Peraturan Gubernur Jawa Timur No. 50 Tahun 2022 tentang Penanggulangan Penyakit Tuberkulosis sudah bertugas sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing, serta menjalankan tugas sesuai dengan ketentuan yang dijalankan, memahami tugas dengan baik dan bekerja sesuai *Standard Operational Procedure* (SOP).

Daftar Pustaka

Agustino, L. 2012. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung : Alfabeta.

Anggara, S. 2017. *Ilmu Administrasi Negara: Kajian Konsep, Teori, dan Fakta dalam Upaya Menciptakan Good Governance*. Bandung: Pustaka Setia

Dwijowijoto, RN. 2017. *Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi, Dan Evaluasi*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.

Hasnanisa, N., Prasetyo, S., Burhanudin, A. 2022. Evaluasi Sistem Surveilans Tuberkulosis di Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas Berdasarkan Pendekatan Sistem. *Bikfokes*. Vol 2 No 3, hal 167-183.

Hatumale, M. 2013. Implementasi Kebijakan Pengembangan Sumber Daya Manusia Dan Dampaknya Terhadap Kinerja Aparatur. *Governance*. Vol 5 No 1, hal 1-9.

Hogan, A.B. Jewell, B.L. Sherrard-Smith, E.. 2020. Potential Impact of the COVID-19 Pandemic on HIV, Tuberculosis, and Malaria in Low-Income and Middle-Income Countries: A modelling study', *Lancet Globe Health*.

- Laary, Y., Tulus, M.G., Dengo, T.S. 2022. Implementasi Kebijakan Keamanan dan Ketertiban di Desa Baru Kecamatan Ibu Selatan Kabupaten Halmahera Barat. *Jurnal Administrasi Publik*. No. 120 Vol. VIII Hal. 60 - 67
- Lubis, L. 2018. *Trend Analisis Dengan Metode Time Series untuk meramalkan penderita TB tahun 2017-2021 berdasarkan data penderita TB tahun 2012-2016 di Kabupaten Mandailing Natal*. Fakultas Kesehatan Masyarakat USU. Skripsi.
- Pralambang, SD dan Setiawan, S. 2021. Faktor Risiko Kejadian Tuberkulosis di Indonesia. *Bikfokes*. Vol 2 (1), 59-71.
- Putra, ON, Wijayanti, N dan Inovita, R. 2021. Evaluasi Kepuasan Pasien Tuberkulosis Fase Intensif Terhadap Pelayanan Informasi Obat di Puskesmas Perak Timur Surabaya. *Farmasains*. Vol. 8 No. 1, hal 37-44.
- Wahab, S.A. 2016. *Analisis Kebijakan: dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta : Sinar Grafika.